

ABSTRAK

Penelitian tentang pembangunan di kota-kota besar sudah banyak dilakukan, namun seringkali penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang pembangunan itu sendiri atau tarik ulur lahan sengketa milik masyarakat – pemerintah. Disini peneliti lebih tertarik untuk membahas tentang persoalan otoritas yang terkait dengan ranah kekuasaan kelembagaan, yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antar lembaga pemerintah terkait dengan proyek pembangunan jembatan layang (*Fly Over*). Pembangunan jalan layang pasar kembang merupakan program yang ingin di laksanakan, untuk mengurai kemacetan yang ada di area tersebut, karena pada area pasar kembang merupakan salah satu sentra perdagangan di surabaya yang memiliki beberapa titik pertemuan arus lalu lintas, yakni Jl. Pasar Kembang, Jl. Diponegoro, Jl. Pendegiling, Jl. Banyu Urip, dan Jl. Girilaya. dengan harapan agar kemacetan yang terjadi pada area tersebut dapat di kurangi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan hasil survei dan di dukung dengan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak - pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jembatan layang, sedangkan data skunder diperoleh dari buku penunjang untuk memperkuat data primer dan menggabungkan antara teori yang ada dengan kondisi yang terjadi sehingga terdapat sinkronisasi antar keduanya. Teori yang di gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori konflik kelompok karena teori ini lebih sesuai dengan apa yang terjadi secara riil.

Hasil penelitian ini adalah ditemukan bahwa PT. KAI dalam kepentingannya tidak melepas lahan miliknya di pasar kembang untuk dibangun fly over oleh pemerintah kota Surabaya, karena pemerintah sebelumnya juga menjanjikan project untuk membangun sebuah transportasi masal yang berbasis kereta api. sedangkan Fly over adalah solusi yang ditawarkan pemerintah kota melalui BAPPEKO untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di area tersebut. Namun dalam proses pembagunan, mengalami kendala yang berupa konflik antar instansi (kelompok) yang mempunyai kepentingan berbeda. Sehingga proses pembangunan terhambat. Terhambatnya proses pembangunan fly over disebabkan oleh kurang baiknya koordinasi antara kedua belah pihak. Namun saat ini solusi dari konflik tersebut sudah diperoleh, yaitu berupa kesepakatan yang diucapkan oleh kedua belah pihak, terutama oleh PT. KAI yaitu dengan mengizinkan lahan yang mereka miliki disewa oleh pemerintah kota untuk dibangun fly over demi kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Konflik, Kepentingan, Kebijakan